Pengembangan Koperasi Kota: Kajian Empirik Koperasi Kota Bandung

Dandan Irawan

Pendahuluan

Peran koperasi menjadi sangat penting dalam menumbuhkembangkan potensi ekonomi rakyat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, untuk itu koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas. Kenyataan menunjukkan bahwa dinamika dan perkembangan ekonomi berjalan cepat, namun koperasi belum mampu mewujudkan perannya sebagaimana digariskan dalam landasan struktural, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Terdapat tiga pelaku ekonomi Nasional Republik Indonesia badan usaha milik Negara (BUMN), swasta dan koperasi, di mana semua badan usaha ini dihadapkan pada situasi dan kondisi persaingan yang mengglobal sedemikian rupa. Ketiganya dituntut untuk memiliki daya saing secara internasional, regional, nasional, dan lokal. Daya saing bukan hanya menyangkut kemampuan mereka bersaing memasok produk ke pasar internasional, tetapi juga dalam pasar domestik untuk menghadapi pesaing dari luar negeri.

Dari ketiga pilar ekonomi tersebut, koperasi merupakan badan usaha yang diharapkan menjadi soko guru perekonomian nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedudukan koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu, koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat.

Pembangunan koperasi adalah suatu upaya yang dilakukan secara terencana untuk membentuk dan mengembangkan koperasi menjadi lebih baik. Pada prinsipnya, untuk mendorong agar pencapaian kinerja koperasi saat ini dapat secara konsisten dan berkelanjutan meningkat di waktu-waktu yang akan datang. Sejalan dengan konstelasi perekonomian yang cepat dan dinamis, maka dinamika aktual aktivitas perkoperasian sesungguhnya harus dikawal dengan desain kebijakan yang lebih adaptif dengan perubahan serta mampu merespon perkembangan dinamika yang terjadi dalam perkoperasian. Untuk dapat menyusun kebijakan (*policy*), aturan (*role*) program (program), dan kegiatan (aktivitas) yang menunjang terhadap upaya pembangunan perkoperasian maka diperlukan data dan informasi, baik primer maupun sekunder yang relevan, akurat, lengkap, dan *up to date*. Data dan informasi yang dibutuhkan di antaranya: pengetahuan tentang organisasi koperasi dan manajemen koperasi, kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi koperasi dalam era globalisasi, kondisi potensi wilayah kerja, dan struktur perekonomian, dan undang-undang serta peraturan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat yang terkait dengan pembangunan maupun pengembangan koperasi.

Upaya menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dilakukan dengan berbagai cara oleh pemerintah daerah salah satunya adalah

Kota Bandung, Salah satu upayanya adalah dengan melakukan identifikasi keragaan koperasi, dan membuat proyeksi pengembangannya melalui berbagai program pembinaan. Secara presentasi, koperasi di Kota Bandung menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen koperasi tidak aktif, dengan indikator utama ialah rutinnya pelaksanaan RAT.

Data Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, pada tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 2.451 koperasi, hanya sekitar 731 koperasi dinyatakan sebagai koperasi aktif. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa koperasi yang terbukti sudah lebih dari dua tahun berturut-turut tidak melaksanakan RAT jumlahnya cukup banyak, dan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku koperasi tersebut dapat diusulkan untuk dibubarkan. Koperasi yang tidak memenuhi syarat pembubaran dimasukkan ke dalam program pembinaan, namun dari hasil pembinaan tersebut kurang menggembirakan, masih banyak koperasi yang direkomendasikan untuk dibubarkan.

Konsepsi Pembangunan Koperasi

Koperasi merupakan tiga bagian dari pelaku usaha di Indonesia, termasuk BUMN dan BUMS, maka tidak ada perbedaan badan hukum koperasi dengan badan hukum lain. Koperasi merupakan bagian dari sokoguru perekonomian nasional dan tata integral perekonomian nasional termasuk BUMN dan BUMS, maka koperasi terhadap badan hukum yang lain memiliki kedudukan yang setara, perbedaannya terletak dari aspek legal badan hukum masing-masing pelaku ekonomi.

Suatu koperasi didirikan untuk menghadapi struktur pasar, baik struktur pasar persaingan sempurna maupun struktur pasar persaingan tidak sempurna (monopolistik, oligopoli, dan monopoli). Sebagaimana halnya dalam kasus struktur pasar persaingan sempurna, pada pasar persaingan monopolistik pun terdapat banyak penjual dan pembeli. Asumsi yang menjadi dasar dari pasar persaingan monopolistik, secara esensial sama dengan pasar persaingan sempurna, kecuali produk yang homogen. Dalam pasar persaingan yang tidak sempurna (monopolistik), suatu koperasi yang berhasil harus mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Oleh karena itu, koperasi sama halnya dengan badan usaha yang lain harus berusaha memaksimumkan keuntungannya.

Dalam pasar persaingan monopolistik, para penjual bersaing melalui diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah perbedaan diantara produk tertentu (misalnya sepatu) dapat dibedakan antara lain: kualitas, harga, kemasan, lokasi, iklan. Setiap produsen berusaha agar produknya mempunyai sedikit perbedaan dari produk yang dijual produsen lain. Para produsen/penjual dapat berperilaku sebagai monopolis “kecil”, yaitu dapat menentukan harga, saat ia mengubah harga produk, tidak terjadi perpindahan total dari konsumen ke produsen lain. Kurva permintaannya tidak akan horizontal, melainkan menurun, menandakan elastisitas permintaan kurang dari elastisitas permintaan pada persaingan sempurna.

Dalam kondisi pasar bagaimana koperasi dengan tingkat kemampuannya akan mencapai hasil-hasil ekonomis yang lebih baik bagi anggotanya. Memusatkan pada kebijakan harga pasar bagi koperasi dan sedikit tentang aturan harga intrakoperasi (*the intra cooperatives pricing rules*). Berapa harga yang harus dibayar anggota pada koperasi pemasok (*supply*) dan berapa harga yang diperoleh anggota pada koperasi pemasaran.

Model neoklasik standar menguraikan: persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Struktur pasar terdiri atas unsur eksternal yang berubah secara lambat dan relatif permanen bagi perusahaan dan mendesak pengaruh jangka panjang atas perilaku, khususnya dalam penentuan harga produk perusahaan dalam pasar. Struktur pasar tergantung pada pertimbangan-pertimbangan, jumlah penjual dan pembeli di pasar, kesamaan produk mereka, dan kemudahan perusahaan untuk memasuki dan meninggalkan pasar (industri). Perilaku bisnis terdiri atas parameter tindakan atau instrumen yang akan digunakan oleh perusahaan, yang berkenaan dengan pemasaran produk-produknya dan bentuk-bentuk pilihan dari persaingan maupun kerja sama dengan pesaing.

Pengembangan Koperasi di Kota Bandung

Profil koperasi Kota Bandung, dapat dilihat dalam penjabaran sebagai berikut:

1. Data Jumlah Koperasi Kota Bandung (Aktif dan Tidak Aktif)

Jumlah koperasi di Kota Bandung adalah sebanyak 2.447 koperasi, dengan rincian 1.720 koperasi tidak aktif (70%) dan 727 aktif (30%), yang dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 1.
Jumlah Koperasi di Kota Bandung (Aktif dan Tidak Aktif)
Sumber: Hasil Kajian Pengembangan Koperasi Kota Bandung, 2022

2. Data Jumlah Koperasi Kota Bandung Berdasarkan Jenis Usaha

Data jumlah koperasi Kota Bandung Tahun 2022 berdasarkan jenis usaha dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 2.
Koperasi di Kota Bandung Berdasarkan Kategori Jenis Usaha
Sumber : Hasil Kajian Pengembangan Koperasi Kota Bandung, 2022

3. Data Jumlah Koperasi Kota Bandung Berdasarkan Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder

Data jumlah koperasi Kota Bandung Tahun 2022 berdasarkan kategori koperasi primer dan koperasi sekunder, dapat dilihat bagan sebagai berikut,

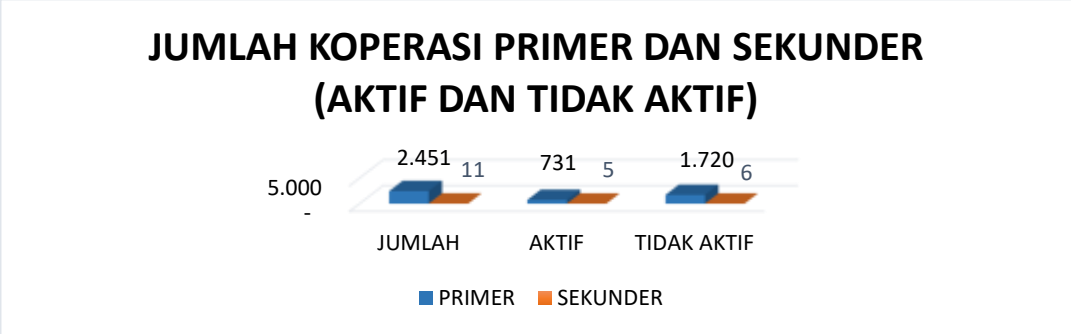

Gambar 3.
Koperasi di Kota Bandung Berdasarkan Koperasi Primer dan Sekunder
Sumber: Hasil Kajian Pengembangan Koperasi Kota Bandung, 2022

4. Data Koperasi Kota Bandung Berdasarkan Aset

Data koperasi berdasarkan aset sesuai dengan pengelompokkan jenis usaha dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 4.
Koperasi di Kota Bandung Berdasarkan Aset
Sumber: Hasil Kajian Pengembangan Koperasi Kota Bandung, 2022

5. Data Koperasi Kota Bandung Berdasarkan Modal Sendiri

Data koperasi berdasarkan modal sendiri sesuai dengan pengelompokkan jenis usaha dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 5.
Koperasi di Kota Bandung Berdasarkan Modal Sendiri
Sumber: Hasil Kajian Pengembangan Koperasi Kota Bandung, 2022

6. Data Koperasi Kota Bandung Berdasarkan Modal Luar

Data koperasi berdasarkan aset sesuai dengan pengelompokkan jenis usaha dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 6.
Koperasi di Kota Bandung Berdasarkan Modal Luar
Sumber: Hasil Kajian Pengembangan Koperasi Kota Bandung, 2022

7. Data Koperasi Kota Bandung Berdasarkan Volume Usaha

Data koperasi berdasarkan aset sesuai dengan pengelompokkan volume usaha dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 7.
Koperasi di Kota Bandung Berdasarkan Modal Luar
Sumber: Hasil Kajian Pengembangan Koperasi Kota Bandung, 2022

8. Data Koperasi Kota Bandung Berdasarkan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Data koperasi berdasarkan SHU sesuai dengan pengelompokkan volume usaha dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 8.
Koperasi di Kota Bandung Berdasarkan SHU
Sumber : Hasil Kajian Pengembangan Koperasi Kota Bandung, 2022

9. Data Koperasi Kota Bandung Berdasarkan Keberadaan Manajer

Data koperasi berdasarkan SHU sesuai dengan keberadaan manajer dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 9.
Koperasi di Kota Bandung Berdasarkan Keberadaan Manajer
Sumber: Hasil Kajian Pengembangan Koperasi Kota Bandung, 2022

10. Data Koperasi Kota Bandung Berdasarkan Jumlah Karyawan

Data koperasi berdasarkan SHU sesuai dengan keberadaan jumlah karyawan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 10.
Koperasi di Kota Bandung Berdasarkan Jumlah Karyawan
Sumber: Hasil Kajian Pengembangan Koperasi Kota Bandung, 2022

11. Data Koperasi Kota Bandung Berdasarkan Keberadaan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK)

Data koperasi berdasarkan KUK sesuai dengan keberadaan manajer dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 11.
Koperasi di Kota Bandung Berdasarkan Klasifikasi KUK
Sumber: Hasil Kajian Pengembangan Koperasi Kota Bandung, 2022

Pengembangan Koperasi

Pengembangan koperasi Kota Bandung secara grafis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 12.
Pengembangan Koperasi di Kota Bandung
Sumber : Pengolahan Data 2022

Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan koperasi di kota Bandung ialah:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT
1.	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan**	a. Menata ulang kelembagaan OPD yang membidangi koperasi	1) Tersusunnya tugas pokok dan fungsi OPD yang membidangi koperasi 2) Terselenggaranya kelembagaan yang efektif dan efisien
		b. Menyempurnakan renstra pengembangan koperasi	1) Tersusunnya Renstra yang merupakan pedoman mewujudkan visi dan misi pengembangan koperasi 2) Tersusunnya program kerja tahunan
		c. Pemenuhan sarana dan prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
		d. Meningkatkan kemampuan tata kelola melalui penerapan *good governance* dan prinsip akuntabilitas	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD yang membidangi koperasi dilaksanakan secara efektif, akuntabel, responsif dan profesional.
		e. Menyusun kegiatan perencanaan, evaluasi dan pengawasan internal	Tersusunnya instrumen perencanaan, evaluasi dan pengawasan internal guna terciptanya pengembangan koperasi yang berkelanjutan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT
2.	**Advokasi, intermediasi dan sosialisasi**	a. Meningkatkan dan memperluas jaringan b. Melaksanakan sosialisasi kebijakan publik dan memberikan layanan advokasi yang diperlukan c. Melaksanakan penyuluhan koperasi kepada masyarakat	Membuka akses pada *stakeholders* perkoperasian Terlaksananya sosialisasi dan kebijakan publik serta advokasi pengembangan koperasi Tumbuhnya kesadaran berkoperasi di kalangan anggota aktif, anggota pasif dan masyarakat luas
3.	**Fasilitasi dan Asistensi Usaha**	a. Koordinasi dengan instansi dan lembaga/ badan usaha terkait b. Melakukan fasilitasi penciptaan akses permodalan dan investasi kepada koperasi c. Meningkatkan kemampuan koperasi dalam penguasaan teknologi yang mendukung kegiatan usaha d. Memberikan layanan intermediasi dan asistensi kepada koperasi yang terkait dalam program pengembangan integrasi usaha	Terbukanya peluang usaha bagi koperasi dan terciptanya kemampuan mengakses sumberdaya-sumberdaya produktif Terciptanya integrasi usaha dalam komoditi produktif yang terkelola secara efisien dan berdaya saing Meningkatnya produktivitas, peningkatan kualitas dan kontinuitas pasok Terciptanya standar pengelolaan usaha koperasi dan tersusunnya suatu jaringan usaha koperasi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT
4.	**Pendidikan dan Pengembangan SDM Koperasi**	a. Menyusun kurikulum pendidikan koperasi dan perkoperasian b. Mengembangkan modul pelatihan keterampilan dan manajerial c. Mengembangkan kerjasama pendidikan dan pelatihan koperasi dengan Dekopinda.	Tersusunnya kurikulum pengetahuan perkoperasian yang berorientasi ke depan baik secara teoritis maupun praktis Terselenggaranya kegiatan pelatihan keterampilan dan manajerial usaha yang sistematis dan sesuai dengan kebutuhan koperasi Terciptanya peningkatan kualitas dan kredibilitas pendidikan dan pelatihan perkoperasian, yang didukung oleh lembaga gerakan koperasi Membaiknya citra dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi
5.	**Informasi dan komunikasi**	a. Pemanfaatan media masa sebagai wahana penyuluhan dan promosi koperasi b. Mendirikan pusat data informasi koperasi c. Melengkapi sarana perpustakaan daerah dengan buku-buku perkoperasian d. Mengembangkan kerjasama dalam rangka pertukaran informasi koperasi e. Menyelenggarakan seminar, loka karya dan simposium secara berkala	Tersedianya data dan informasi koperasi yang lengkap dan terpercaya Tersedianya keragaman literatur yang terkait dengan perkoperasian Terbukanya akses informasi dengan instansi/ lembaga atau badan yang terkait dengan pengembangan koperasi Tersosialisaikannya pemikiran dan hasil-hasil pengembangan koperasi ke masyarakat Memperkuat pangsa usaha koperasi dalam komoditi usaha yang sejenis Terhimpunnya sumberdaya untuk mempercepat pengembangan koperasi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT
6.	**Peningkatan kerjasama lokal, domestik dan mancanegara**	a. Meningkatkan kerjasama usaha antar koperasi b. Mengembangkan kerjasama dalam rangka pengembangan koperasi tingkat domestik dan mancanegara c. Mengembangkan *pilot project* atau proyek kerjasama dalam rangka pengembangan usaha koperasi.	Terciptanya aliansi strategis yang kongkrit antara koperasi dengan swasta dan BUMN Tersedianya bahan masukan yang objektif dan mutakhir guna memantapkan pelaksanaan pengembangan koperasi Tersedianya perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha koperasi
7.	**Pengkajian dan pengembangan**	a. Melaksanakan kajian stratejik pada aspek-aspek berpengaruh signifikan pada pengembangan koperasi b. Melakukan kajian dan perumusan kesisteman manajemen koperasi c. Melaksanakan sosialisasi hasil kajian kepada gerakan koperasi d. Menginventarisir hasil kajian perkoperasian yang dilakukan instansi/ lembaga lain	Gerakan koperasi dapat memahami dan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang dihadapi Tersusunnya data base hasil kajian koperasi yang lengkap Tercapainya sasaran-sasaran pengembangan koperasi yang ditetapkan dan terselenggaranya tata kelola yang akuntabel Tersusunnya hasil kajian perkoperasian
8.		a. Memanfaatkan dana APBD secara efektif, efisien dan optimal b. Membuka akses dan alokasi pembiayaan dari sumber-sumber lain di dalam dan di luar negeri	Tercukupinya kebutuhan pembiayaan dari sumber-sumber non APBD Terbukanya akses pembiayaan

Sumber: Hasil Kajian Pengembangan Koperasi Kota Bandung, 2022

Penutup

Pengembangan koperasi di kota Bandung dapat dilaksanakan dengan memperhatikan:

1. Seluruh data dan informasi yang dituangkan dalam lima (5) kelompok keragaan koperasi, yaitu (1) Reafirmasi, (2) Revitalisasi; (3) Aktualisasi; (4) Rektualisasi dan (5) Modernisasi; Koperasi dalam klasifikasi Modernisasi adalah koperasi dalam kondisi transformasi total dari kehidupan koperasi tradisional menjadi modern. Dalam hal ini terjadi peningkatan secara menyeluruh dalam kehidupan koperasi ke arah modern. Pada

tahap ini, koperasi telah berkembang secara mandiri baik dari aspek organisasi maupun usaha. Orientasi pengembangan koperasi lebih fokus pada pembentukan jejaring kerjasama vertikal dan horizontal berbasis teknologi, sehingga kapasitas, kualitas dan daya saing koperasi menjadi sangat kuat, koperasi menjadi pilihan anggota dan masyarakat untuk bertransaksi.

2. Program pengembangan koperasi Kota Bandung harus dilakukan secara bertahap, dan tahapan yang dianggap sangat perlu dan penting adalah pemetaan keragaan dan identifikasi potensi pengembangan koperasi, yang pada intinya baru bisa dilaksanakan jika tersedia data, sehingga ketersediaan data base yang lengkap dan akurat menjadi keharusan dalam penetapan program pengembangan koperasi;
3. Arah pemetaan jalan (*road map*) dilaksanakan dari tahun 2023 sampai 2027 dengan arah fokus dengan lima tahap atau setiap tahun sebagai berikut: (1) fokus pada pemetaan koperasi, penyusunan *action plan*, pengembangan koperasi dan penguatan kelembagaan koperasi, (2) Fokus pada penguatan kelembagaan koperasi, pengelolaan usaha berbasis IT dan pembentukan jaringan kerjasama usaha koperasi, (3) Fokus pada penguatan kelembagaan koperasi berbasis IT, pembentukan dan penguatan jejaring kerjasama usaha koperasi dan pembentukan dan pengembangan koperasi sekunder, (4) Fokus pada penguatan usaha dan jejaring kerjasama koperasi dan fokus penumbuhan inovasi dan (5) Fokus pada penguatan usaha dan fasilitasi jejaring kerjasama koperasi dan fasilitasi penumbuhan inovasi.

Bibliografi

Arifin Sitio, Halomoan Tamba, 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga

Davis, Peter, 2011. *Mengembangkan Keunggulan Koperasi.* Jakarta: LSP2I

Diskop Kota Bandung, 2022. Renstra Pemkot Bandung Perihal Perkoperasian

_____ 2022. RPJM Pemkot Kota Bandung Perihal Perkoperasian

Diskop & UKM Provinsi Jabar.2021. Renstra Pemprov Jabar Perihal Perkoperasian

Kemenkop & UKM RI. 2021. Renstra Kemenkop & UKM RI Perihal Perkoperasian

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 2008. *Undang-Undang Nomor 20/2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*.

Muh. Sil, 2013. Pembangunan Koperasi Dalam Kegiatan Usaha Pada Era Globalisasi. Universitas Terbuka.

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rusidi, 2013. *Pokok Pemikiran Koperasi*. Bandung: Ikopin Press